



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI
(DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEP. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Persidangan : I
Jenis : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Senin, 30 November 2009
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Melanjutkan Rapat Dengar Pendapat tanggal 25 November 2009
Jumlah kehadiran : 35 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 10 orang izin

I. PENDAHULUAN

Skors Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKKBN beserta jajarannya dicabut pukul 14.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Kepala BKKBN melanjutkan menyampaikan jawaban pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi IX DPR RI.

III. KESIMPULAN

Setelah mendengarkan jawaban yang diberikan oleh Kepala BKKBN maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN segera menyelesaikan berbagai penyiapan PP yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan UU NO. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN lebih serius menangani permasalahan demografi penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang dapat meningkatkan masalah sosial di masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN melakukan sinergi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan kesejahteraan keluarga terutama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen lain misalnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Lembaga Pendidikan yang terkait, berbagai organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat dan kemitraan dengan institusi lain yang memiliki fasilitas pelayanan KB.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN melakukan penguatan konsep keluarga sejahtera untuk memantapkan upaya penurunan fertilitas.
5. Komisi IX DPR RI mendorong BKKBN bersama Menpan untuk menambah formasi Petugas Lapangan KB (PLKB) dan lebih memperhatikan pembinaan PLKB sehingga mereka tidak mudah berpindah bidang tugas yang lain.
6. Karena masalah kependudukan yang mendesak, Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan anggaran BKKBN sesuai dengan UU yang baru No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz